

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bohari, **Pengantar Hukum Pajak**, Edisi Revisi, PT Raja Persada Grafindo, Jakarta, 2010.
- Hadjon, Philipus M., **Pengantar Hukum Administrasi**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994
- Hadjon, Philipus M., **Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi**, Cet. II, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012.
- Marzuki, Mahmud, Peter, **Penelitian Hukum**, Kencana, Cet. II, Jakarta, 2005.
- Pudiatmoko, Sri, **Pengantar Hukum Pajak**, Edisi Revisi, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.
- Subagio, **Hukum Keuangan Negara R.I**, Cet. II, PT Raja Persada Grafindo , Jakarta, 1991.
- Sumitro, Rochmat, **Asas dan Dasar Perpajakan**, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Zandjani, Tubagus Chairul Ahmadi, **Perpajakan**, Gramedia pustaka, Jakarta, 1992.

JURNAL

- Syarif, Agus, **Modul Lembar Kerja Perpajakan untuk SMK, Mahasiswa dan Umum**, Yudhistira, Bandung, 2005.

MAJALAH

- Nur Hari Susanto, Sri, **Memahami Asas Ne bis Vexari dan Penggunaannya Dalam Sanksi Administrasi**, Majalah, Masalah-Masalah Hukum, Tahun XXV No.7, Semarang, FH.UNDIP, 2000.

INTERNET

- apakah uang yang direlakan oleh PNS untuk kegiatan sosial itu uang negara, <http://ntt.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=151985> senin 22 juli 2013.

Anandita Budi Suryana, *Tax Evasion* Pajak Properti, www.pajak.go.id, tanggal 25 Juni 2013.

Aziza, Kurnia Sari, APBN 2014, www.tempo.com, tanggal 26 Maret 2014.

Edi Wahyudi, Pajak Properti, www.eddiwahyudi.com, tanggal 4 Maret 2014.

Hadi, Iman, Jumlah Penerimaan Pajak 2013, www.Pajak.go.id, tanggal 8 Januari 2014.

Penghindaran Pajak, id.wikipedia.org, tanggal 29 Januari 2014.

Prihatmoko, Hedwi, Penerimaan Pajak Properti, www.ortax.org, tanggal 16 Maret 2014.

Rachmany, Fuad, Realisasi Pendapatan Pajak, *bisniskeuangan*, www.kompas.com, tanggal 6 Januari 2014.

Setyawan, Iwan, Pengembang Properti Keberatan, www.kompas.com, tanggal 17 Januari 2014.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4953)

Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4893)

Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4999)

Undang-Undang No 20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4893)

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3891)